

PERAN ETIKA POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Paulus I. Funome, Willy Tri Hardianto, Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: paulus.fun88@gmail.com

Abstrak: Etika politik merupakan upaya yang memungkinkan institusi-institusi sosial mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Keadilan yang diarahkan bukan ingin menghapus ketidaksetaraan terjadinya keadilan dan keseimbangan. Perumusan kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam membangun masyarakat maupun pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dengan teknik purposif sampling dan snowball. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik di kota Malang memiliki esensi dan bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat walaupun masih belum maksimal. 2. Faktor pendukungnya meliputi, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi yang tidak menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang diinginkan, tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat serta komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 3. Faktor penghambatnya meliputi ketersediaan anggaran dalam penyusunan kebijakan minim, minimnya ketersediaan data hasil penelitian (research), kebijakan terkadang dibuat atas kepentingan sepihak tanpa melihat kepentingan publik.

Kata kunci: Etika Politik, Perumusan Kebijakan, Pendukung, Penghambat

Abstract: Political ethics is an effort that enables social institutions distributes rights and fundamental duties and determines the division of benefits in social collaboration. The justice directed does not want to remove the justice inequalities and balance. The public formulation policy is a policy or rule made by the government as a policy maker to achieve certain goals in building society and governance. This study used descriptive qualitative research, by executing steps of data collection through observation, interview, and in-depth documentation with field informants obtained by purposive sampling and snowball technique. From the research that has been conducted, it is obtained conclusions: 1. The political ethics role done in public policy formulation in Malang City has essence and aim to meet the society' wishes, but all that was done by the people's representatives have not achieved what is wished by the people. 2. Their supporting factors include: external conditions faced by the agencies or institutions that do not cause nuisance or serious constraints, deep understandings and consensus on the wished objectives, and tasks specified and placed in the proper order and perfect communication and coordination. 3. Inhibiting factors of which include: availability of budget for a minimal policy, lack of adequate research data (research), policy sometimes made on behalf of the interests of either unilateral without public.

Keywords: Political Ethics, Policy Formulation, Supporting, Inhibiting

PENDAHULUAN

Etika politik dalam praktik demokratisasi kini menjadi kajian mendesak dan menarik setidaknya karena dua alasan, pertama fenomenas praktik politik ditengarai sudah keluar jalur etika politik dan moralitas publik. Kedua, munculnya kesadaran baru dalam masyarakat kita untuk berikhtiar membangun masyarakat demokratis, *good and clean governance* yang berlandaskan etika (Thomson, 2000).

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan

kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston (2002) bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul: Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan berusaha menggambarkan, melukiskan dan memaparkan obyek yang diteliti berdasarkan keadaan secara apa adanya dengan menggunakan data non statistik yang tersedia.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian atau mengambil data mengenai apa yang diteliti dan dari penelitian ini nantinya akan mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Waktu penelitian adalah tanggal 17 April 30 Mei.

Dalam melakukan analisis, data menjadi faktor utama dan sangat menentukan dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu dalam pengumpulan data ini lebih efisien apabila dilakukan berdasarkan metode atau langkah-langkah tertentu agar data lengkap sehingga tercapai kebenaran ilmiah yang dikehendaki. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (*pengamatan*)
2. Interview (*wawancara*)
3. Dokumentasi

Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini diperoleh secara *purposive sampling* yang menurut Maleong (2000) merupakan sumber data penelitian berupa benda, hal-hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data atau informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Didalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan melalui *key informan*, yaitu informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian yang dipilih secara *purposif* (*purposive sampling*). Dalam penelitian ini yang menjadi *informan* kunci adalah Pimpinan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang. Informasi selanjutnya diperoleh secara serial dan berurutan melalui metode "*snowball sampling*" informan yang dimaksud yaitu *informan* yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, yang terdiri dari seluruh Pegawai Kantor Kota Malang. Proses pengumpulan data ini akan dihentikan data yang dibutuhkan sudah terpenuhi dan sudah mencapai titik kejenuhan.

Analisa data merupakan kegiatan yang penting dan menentukan, pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil disimpulkan kebenarannya, agar dapat dipahami untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992) Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, tetapi sebelum dilakukan ketiga jalur analisis ini hal pertama yang penting adalah pengumpulan data jadi analisis data kualitatif dengan menggunakan alur kegiatan yang meliputi: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan (verifikasi)

SAJIAN DATA

Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Etika politik merupakan upaya yang memungkinkan institusi-institusi sosial mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasarnya serta menentukan pembagian keuntungan hasil kerja sama sosial. Keadilan yang diarahkan bukan ingin menghapus ketidakadilan, melainkan berusaha memastikan terjaminnya keadilan dan keseimbangan, dalam konteks inilah tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkungan kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil terutama dalam perumusan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 April 2012 pukul. 09.15 WIB pada Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yaitu Bapak Arief Wahyudi, SH. Saat ditanyakan seperti apakah peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik di Kota Malang saat ini? Beliau menuturkan:

”Lebih mengacu pada mesin birokrasi pemerintah Indonesia ini yang sangat sarat dengan warna politik,...maka kekuatan politik menjadi satu kunci yang perlu dipertimbangkan, sehingga dapat diputuskan, bahwa yang ingin dicapai dari konsep etis dalam pembuatan keputusan ini adalah pelayanan terhadap masyarakat,... bahkan jika kebijakan publik terumuskan tanpa mengindahkan politik antara lembaga, maka tetap saja sah dari sisi formalisme demokrasi, namun pada tahap ini etika dikorbankan.”

Dalam wawancara dengan Bapak Hery Sabianto sebagai anggota komisi C DPRD Kota Malang pada tanggal 25 April 2012 pukul 10.40 WIB dengan pertanyaan seperti apakah peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik di Kota Malang saat ini? Beliau menjawab:

”Komposisi sosio-ekonomi dan kondisi historis-geografis, selain itu, beliau juga menyampaikan satu hal penting, yaitu lingkungan internasional (world system) merupakan sistem politik yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran etika dalam berpolitik serta pengalihan wewenang.”

Pada tanggal 07 Mei 2012 pukul 12.10 WIB, dengan pertanyaan yang sama kepada salah satu anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Beliau mengatakan:

”Membahas tentang etika dalam berpolitik seperti demikian miskin di Negara kita, bahkan punggung kekuasaan dan keberagaman warna elitnya lebih gemerlap daripada nuansa etika itu sendiri, ketika elit yang pragmatis menguasai pemerintahan, ketika itu juga proses keputusan menjadi jembatan pemenuhan hasrat kekuasaan, kenyataan ini memang ironis, tetapi ketidakpuasan kemudian menjadi hasil maksimal yang diproduksi mesin tersebut, jadi perumusan kebijakan publik yang ada sekarang belum sesuai dengan keinginan masyarakat umum baik di kota Malang maupun di seluruh daerah-daerah yang ada di Negara Indonesia.”

Diwaktu dan tempat yang lain (15 Mei 2012 Pukul 13.00 WIB) salah satu Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti di atas. Beliau berkata:

”Proses perumusan kebijakan sebagai punctuated equilibrium yang berbasis pada dimensi waktu, di mana suatu kebijakan yang stabil akan mengalami masa transisi dan instabil hingga muncul kebijakan baru,...di mana kebijakan merupakan output dibatasi oleh perilaku elit, institusi pemerintah, perilaku politik massa”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya peran etika dalam perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh wakil rakyat bertujuan untuk mengesjahterakan rakyat dan negara namun semuanya itu belum optimal atau sesuai dengan harapan rakyat karena kurangnya pemahaman dari para pembuat kebijakan itu sendiri mengenai etika dan perumusan kebijakan.

Oleh karena itu etika politik akan menggejala pada perilaku yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki akibat pada orang lain. Jika seseorang suka menumpuk harta dengan cara korupsi, tentu hal itu mempengaruhi pada kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan perbuatannya itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika publik.

Faktor Pendukung Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Faktor pendukung upaya etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi beberapa hal. Dalam wawancara dengan Bapak Hery Sabianto sebagai anggota komisi C DPRD Kota Malang tanggal 25 April 2012 pukul 10.40 WIB dengan pertanyaan apa saja yang menjadi faktor pendukung etika politik dalam proses perumusan kebijakan publik?

Beliau mengatakan:

”Faktor pendukung tercapainya kebijakan publik seperti kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, ketergantungan yang kecil, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna”

Pada tanggal 07 Mei 2012 pukul 12.10 WIB, dengan pertanyaan yang sama kepada salah satu anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, beliau mengatakan:

”Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat, dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.”

Diwaktu dan tempat yang lain (15 Mei 2012 Pukul 13.00 WIB) Bapak Drs. Slamet selaku Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti di atas. Beliau berkata:

”Yang menjadi faktor pendukung politik dalam perumusan kebijakan publik adalah tersedianya fasilitas bagi anggota DPRD meskipun fasilitas itu belum memadai.”

Faktor Penghambat Etika Politik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik

Banyak faktor yang menjadi penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik di antaranya yang disebutkan oleh salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pada tanggal 25 April 2012 pukul 10.40 WIB saat ditanya faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses perumusan kebijakan publik? Beliau menjawab:

”Beberapa faktor dasar yang menjadi penghambat selama ini seperti, teori yang mendasari dasar pelaksanaan kebijaksanaan itu tidak tepat, sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif, sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya, isi dari kebijakan itu bersifat samara-samar dan ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern yang ada saat ini”

Diwaktu dan tempat yang lain (15 Mei 2012 Pukul 13.00 WIB) salah satu Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti di atas. Beliau berkata:

”Hal-hal yang menghambat perumusan kebijakan publik seperti, rapat yang kadang-kadang bersifat tertutup, dan tidak terbuka bagi banyak pihak yang mengamati”.

Pada tanggal 08 Mei 2012 saat ditanya hambatan apa yang dialami dalam perumusan kebijakan publik selama ini, Ibu Dra. Peny Indriyani, MM selaku bagian humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menuturkan bahwa:

” Ketersediaan anggaran bagi proses penyusunan kebijakan yang minim atau terbatas yang pasti akan menyebabkan minimnya ketersediaan data hasil penelitian (research), yang data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan Stakeholders terhadap kebijakan yang akan dibuat (Stakeholders Assessment Baseline Research) yang harus dilakukan sebelum proses penyusunan Academic Draft dan Legal Draft.”

Pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 11.35 WIB salah satu anggota komisi B DPRD Kota Malang saat ditanya seperti apa yang diungkapkan Ibu Peny:

”Biasanya kebijakan publik dibuat atas dasar kepentingan sepihak atau kepentingan salah satu komponen saja tanpa melihat kepentingan publik, misalnya penyusunan kebijakan yang hanya berpihak kepada pemerintah saja atau dunia usaha saja atau kelompok besar dari unsur parpol tertentu saja, kemampuan pembuat Academic draft dan Legal draft ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai seluk beluk proses penyusunan kebijakan, ditambah lagi dengan pola pikir serta perspektif yang sangat terbatas.

Dari hal-hal diatas dapat dilihat juga bahwa faktor pendukung dan penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik seringkali orang mengatakan politik itu kotor, busuk, dan kejam. Dunia politik tidak kenal kawan kecuali kepentingan. Sehingga muncul adagium, tak ada kawan sejati selain kepentingan itu sendiri. Siapa kawan, siapa lawan sulit dibedakan dalam praktik politik. Kondisi politisasi semacam ini setidaknya karena perubahan kondisi atau konstelasi politik yang sulit diperhitungkan secara sistematis dan dikotomis.

Ekses-ekses negatif yang timbul dan perilaku pejabat negara dalam mengeluarkan kebijakan politiknya, sadar atau tidak, langsung atau tidak, dapat mempengaruhi psikologis sosial masyarakat. Banyak kasus seperti ini tidak hanya melibatkan seorang pejabat negara melainkan konspirasi yang berkelanjutan. Pemikiran yang bisa mengeliminasi permasalahan seperti ini karena tanggung jawab kriminal dari pemerintah secara keseluruhan merupakan satu pengecualian yang tidak dapat dipahami dalam sistem internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Franz Magnis-Suseno dalam buku *Etika Politik*, menjelaskan, peran etika politik adalah mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Etika politik, berperan pada keadaan yang seharusnya. Keadaan ideal yang memang bila dilanggar tidak akan menyebabkan jatuhnya hukuman fisik, melainkan hanya menghasilkan hukuman moral (Magnis-Suseno. 1987).

Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur struktur yang ada. Dalam perspektif ini pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan: (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan (3) membangun institusi-institusi yang adil.

Faktor Pendukung Etika Politik Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Adapun perilaku birokrasi atau pejabat publik, paling tidak dibentuk oleh 5 (lima) norma, yaitu norma jabatan, norma sosial, norma profesi, norma keluarga, serta norma-norma lainnya (hukum, kesopanan, kesusilaan). Norma atau etika jabatan mempelajari perbuatan pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu dan berwenang untuk berbuat atau bertindak dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah (Bayu Suryaningrat, 1984).

Keseluruhan norma diatas harus benar-benar dipahami oleh aparatur pemerintah, dengan tidak memberikan bobot yang lebih dominan kepada salah satunya. Manakala terdapat keseimbangan antar norma-norma tersebut, diharapkan praktek pelayanan publik-pun tidak akan bersifat pilih kasih atau

pandang bulu. Semua lapisan masyarakat membutuhkan pelayanan birokrasi (*public service*), tetapi yang lebih dibutuhkan adalah sikap keadilan (*equity*) dari para birokrat. *Political will* pemerintah untuk menciptakan sosok birokrasi yang memiliki perilaku terpuji ini sebenarnya telah dilaksanakan secara sistematis.

Sebagaimana diketahui, Birokrasi atau Administrasi Publik memiliki kewenangan bebas untuk bertindak (*discretionary power* atau *freies ermessen*) dalam rangka memberikan pelayanan umum (*public service*) serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bestuurzorg*). Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut kebijakan publik (*public policy*).

Faktor Penghambat Etika Politik Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik

Ketersediaan anggaran bagi proses Hierarki Etika, di dalam pelayanan publik terdapat empat tingkatan etika. Pertama, etika atau moral pribadi yaitu yang memberikan teguran tentang baik atau buruk, yang sangat tergantung kepada beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu. Kedua adalah etika profesi, yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Ketiga adalah etika organisasi yaitu serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Dan keempat, etika sosial, yaitu norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara (Shafritz & Russell, 1997).

Adanya hirarki etika ini cenderung membingungkan keputusan para aktor pelayanan publik karena semua nilai etika dari keempat tingkatan ini saling bersaing. Misalnya, menempatkan orang dalam posisi atau jabatan tertentu sangat tergantung kepada etika yang dianut pejabat yang berkuasa. Bila ia sangat dipengaruhi oleh etika sosial, ia akan mendahului orang yang berasal dari daerahnya sehingga sering menimbulkan kesan adanya KKN. Bila ia didominasi oleh etika organisasi, ia barangkali akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam organisasi seperti menggunakan sistem "senioritas" yang mengutamakan mereka yang paling senior terlebih dahulu, atau mungkin didominasi oleh sistem *merit* yang berarti ia akan mendahulukan orang yang paling berprestasi.

Dengan demikian, persoalan moral atau etika didalam konteks ini akhirnya tergantung kepada tingkatan etika yang paling mendominasi keputusan seorang aktor kunci pelayanan publik. Konflik antara nilai-nilai dari tingkatan etika yang berbeda ini sering membingungkan para pembuat keputusan sehingga kadang-kadang mereka menyerahkan keputusan akhirnya kepada pihak lain yang mereka percaya atau segani seperti pejabat yang lebih tinggi, tokoh-tokoh karismatik, "orang pintar".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran etika politik yang dilakukan dalam perumusan kebijakan publik yang dilakukan di kota Malang memiliki esensi dan bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat, namun semua yang dilakukan oleh para wakil rakyat belum tercapai apa yang diinginkan oleh rakyat. Faktor pendukung peran etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi yang tidak menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan yang diinginkan, tugas-tugas dirinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat serta komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Faktor penghambat etika politik dalam perumusan kebijakan publik meliputi ketersediaan anggaran bagi proses penyusunan kebijakan yang minim, minimnya ketersediaan data hasil penelitian (*research*) mengenai kebutuhan masyarakat, kebijakan kadang-kadang dibuat atas kepentingan sepihak atau kepentingan salah satu komponen stakeholders saja tanpa melihat kepentingan publik, ditambah lagi dengan pola pikir serta perspektif yang sangat terbatas mengenai keberadaan Stakeholders sebagai pemangku kebijakan dengan jarang melibatkan Stakeholders dalam proses penyusunan draft kebijakan.

Saran

1. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan secara terbuka dan dijalankan sesuai dengan etika terutama dalam perumusan kebijakan publik untuk memenuhi keinginan rakyat bukan untuk memenuhi keinginan individu atau kelompok tertentu saja.
2. Kondisi eksternal dan komunikasi antar sesama harus dijaga agar tidak menimbulkan suatu kendala yang serius bagi para wakil rakyat demi membangun daerah dan masyarakat.
3. Keterlibatan instansi pemerintah atau organisasi serta masyarakat untuk menyikapi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh wakil rakyat. Sebaiknya memberikan masukan atau kritikan, bantuan sarana atau prasarana agar pelaksanaan perumusan kebijakan publik berjalan sesuai dengan etika politik atau undang-undang yang ada dan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2004:25

Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Riseart Sosial, CV. Mandar Maju 1961:73

Magnis-Suseno, F., *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Moral Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta. 1998

Miles, Methew dan Hubernan A. Michael. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (penerjemah: T. R. Rohidi). Jakarta: UI pers. 1992

Moh.Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, 2003:193

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan 2010

Suseno Franz Magnis, Titik Temu Etika Politik, 04 Mei 2008

Sutrisno Hadi, Metodolgi Research. Jilid pertama, edisi pertama, cetakan kesembilan belas, andi offset, Yogyakarta. 1997

Teguh Kurniawan. Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan Publik” Lembaga Administrasi Negara (LAN), Universitas Indonesia. Februari 2010.

Varma, SP, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001

Lain-lain:

http://guritno.onesite.com/blog/2007/09/24/perumusan_kebijakan_publik

<http://wiyantooa86.wordpress.com/2009/04/06/etika-politik/>